

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN  
  
NOMOR : 43 /PK.KDH/A/2019  
NOMOR : 03 /N.KES-DPRD/2019  
TANGGAL : 7 Agustus 2019  
  
TENTANG  
  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Sri Purnomo  
Jabatan : Bupati Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Haris Sugiharta  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman  
  
b. Nama : H. R. Sukaptana  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

- c. Nama : R. Inoki Azmi Purnomo  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman
- d. Nama : Sofyan Setyo Darmawan  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman  
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal dimaksud, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dalam sebuah buku yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.

Sleman, 7 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN

Selaku,

PIHAK PERTAMA



SRI PURNOMO

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

Selaku,

PIHAK KEDUA



HARIS SUGIHARTA

KETUA

H. R. SUKAPTANA

WAKIL KETUA

R. INOKI AZMI PURNOMO

WAKIL KETUA

SOFYAN SETYO DARMAWAN

WAKIL KETUA

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020.

Sleman, 7 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN

Selaku,  
PIHAK PERTAMA

The block contains the official circular stamp of the Bupati Sleman, featuring a Garuda emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SRI PURNOMO

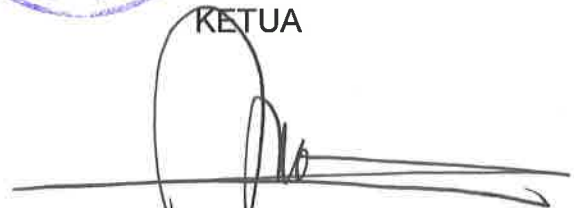
PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

Selaku,  
PIHAK KEDUA

This block features the official circular stamp of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman. It also includes a 6000 Rupiah stamp with the serial number 6221GAF686443077 and a handwritten signature.

HARIS SUGIHARTA

KETUA

A large, stylized handwritten signature in black ink, belonging to H. R. Sukaptana.

H. R. SUKAPTANA

WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink, belonging to R. Inoki Azmi Purnomo.

R. INOKI AZMI PURNOMO

WAKIL KETUA

A handwritten signature in black ink, belonging to Sofyan Setyo Darmawan.

SOFYAN SETYO DARMAWAN

WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

	Hal
Nota Kesepakatan	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I    PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan	19
3. Dasar Hukum	19
BAB II    KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	21
1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2014-2019	21
2. Rencana dan Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2019 dan 2020	34
BAB III    ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	38
1.1 Tema Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2020	38
1.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2020	39
BAB IV    KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH	42
1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah	42
2. Kebijakan Umum Belanja Daerah	45
3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	88

4. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Perubahan Anggaran Tahun 2020	89
BAB V PENUTUP	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, DIY dan Sleman Tahun 2020	4
Tabel 2.1.	Pertumbuhan sektor dan PDRB Harga Konstan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sleman	22
Tabel 2.2.	PDRB dan Distribusi Persentase PDRD Menurut Lapangan Usaha ADH Berlaku Tahun 2013-2017 Kabupaten Sleman	24
Tabel 2.3.	PDRB Per Kapita Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Sleman (juta)	26
Tabel 2.4.	Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2014 s.d 2018 Kabupaten Sleman (%)	27
Tabel 2.5.	Indeks Gini Tahun 2012-2017 Kabupaten Sleman	29
Tabel 2.6.	Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2014-2018 Kabupaten Sleman	31
Tabel 2.7.	Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014-2018 Kabupaten Sleman	33
Tabel 2.8.	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi	37
Tabel 4.1.	Prioritas Sasaran, Program Kabupaten Sleman Tahun 2020	50
Tabel 4.2.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	89

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Grafik Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman	21
Gambar 2.2.	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman	23
Gambar 2.3.	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman , DIY, dan Nasional dalam persentase	26
Gambar 2.4.	Laju Inflasi Kabupaten Sleman Tahun 2014 s.d 2018 (%)	28
Gambar 2.5.	Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2014-2017	30



# **KABUPATEN SLEMAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Sleman Tahun 2020 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020. KUA disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD Tahun 2020, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2016-2021 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya**

### **Sistem *E-government* Menuju *Smart Regency* Pada Tahun 2021"**

yang akan dicapai melalui misi:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- d. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- e. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

Visi dan Misi Kabupaten Sleman Tersebut mengacu pada Agenda prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 atau disebut ***nawacita*** adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi Domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sedangkan saat ini telah disusun pula agenda pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public.

Dalam rangka menjabarkan agenda prioritas yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, disusun tema pembangunan nasional Tahun 2020 yaitu **"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"** yang kemudian diacu oleh Pemda DIY untuk menetapkan tema pembangunan DIY tahun 2020 yaitu **"Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas"**.

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Sleman dan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 dan isu strategis Tahun 2020, serta penyelarasan dengan tema RKP 2020 dan RKPD DIY 2020 maka tema pembangunan

Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah **“Memantapkan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya”**.

**Tabel 1.1**  
**Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, DIY**  
**dan Sleman Tahun 2020**

<b>NASIONAL</b>	<b>DIY</b>	<b>SLEMAN</b>
<b>Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas</b>	<b>Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas</b>	<b>Memantapkan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya</b>

Bertolak dari kemajuan yang telah dicapai, dan rencana capaian tahun 2020, di Kabupaten Sleman ternyata kondisi yang ada masih menunjukkan permasalahan dan tantangan yang harus diatasi dalam pelaksanaan pembangunan di tahun 2020 ini.

Permasalahan pembangunan daerah yang dimaksudkan dalam subbab ini adalah permasalahan yang muncul terkait dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2019. Pada RKPD 2019 disebutkan ada 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah, yaitu (1) tata kelola pemerintahan; (2) budaya; (3) pendidikan; (4) kesehatan; (5) penanggulangan kemiskinan; (6) pengembangan potensi lokal; (7) infrastruktur; (8) lingkungan hidup, dan (9) meningkatkan pendapatan masyarakat.

Prioritas dan sasaran tersebut di atas mempunyai target kinerja yang harus dicapai pada tahun tersebut dengan indikator yang telah ditentukan. Hasil-hasil pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, beserta beberapa permasalahan yang dihadapi disajikan sebagai berikut.

#### **1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif**

Dalam prioritas ini terdapat 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- a) meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah;
- b) meningkatnya kemandirian keuangan daerah; serta
- c) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sasaran pertama, meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah mempunyai indikator predikat LAKIP kabupaten dan opini BPK terhadap LKD. Pada tahun 2018, perolehan nilai pada akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) adalah 81,72 dengan predikat A. Pencapaian akuntabilitas kinerja ini dipengaruhi oleh perencanaan daerah yang dilakukan pada awal waktu dan sasaran pembangunan yang berorientasi hasil (*outcome*), *refocusing* program/kegiatan yang mendukung sasaran pembangunan, penetapan APBD awal waktu, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih handal, pengelolaan data kinerja yang baik, serta pelaporan kinerja yang tepat waktu dan berkualitas. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik telah menerapkan *e-government* melalui sistem informasi manajemen (SIM) dan aplikasi berbasis *smartphone*. Sedangkan untuk opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD) sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Sleman mendapatkan WTP dan ini harus dipertahankan.

Sasaran kedua, meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan indikator sasaran persentase PAD terhadap pendapatan daerah. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2018 mencapai 32,96 persen dari target 32 persen. Meskipun sudah mencapai target, angka ini perlu ditingkatkan agar kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Komponen PAD ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan. Dari keempat komponen tersebut, proporsi paling besar adalah pajak daerah. Pajak ini terdiri dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak parkir, pajak mineral dan batuan bukan logam, pajak penerangan jalan, pajak reklame, serta lain-lain.

Sasaran ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat. Angka ini diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pencapaian indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2018 sebesar 81,39. Walaupun sudah melampaui target, Pemerintah Kabupaten Sleman tetap harus meningkatkan sehingga pelayanan akan lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat.

Permasalahan yang masih ditemukan di dalam prioritas meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif adalah :

- a. Belum tersedianya pusat layanan masyarakat terpadu untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (mall perijinan);
- b. Belum optimalnya pelaksanaan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- c. Belum diterapkannya kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja dan pengembangan pegawai berkelanjutan; serta
- d. Layanan pemerintah daerah belum memenuhi ekspektasi masyarakat dengan masih banyaknya aduan di berbagai portal milik pemerintah daerah.

## **2. Mewujudkan kemandirian dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing di pasar internasional**

Dalam prioritas ini terdapat 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- a) meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- b) meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian; serta
- c) meningkatnya kesempatan kerja.

Sasaran pertama, meningkatnya pertumbuhan ekonomi mempunyai indikator pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman 6,42%, lebih

tinggi dari pertumbuhan ekonomi DIY (6,20%) maupun pertumbuhan ekonomi nasional (5,17%) namun masih bersifat angka sangat sementara. Laju pertumbuhan PDRB terbesar pada sektor konstruksi (13,08%). Selanjutnya, kontribusi terbesar penyumbang PDRB adalah sektor industri pengolahan (13,19%), konstruksi penyediaan akomodasi dan makan minum. Sedangkan pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai mayoritas mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman hanya 7,41 persen. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi belum tentu terdistribusi secara merata di setiap lapisan masyarakat. Hal ini tercermin dari indeks gini di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 adalah 0,41, lebih tinggi dari indeks gini nasional 0,39, namun lebih rendah dari indeks gini DIY 0,43. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling bawah dengan kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling atas sangat besar dan sangat timpang. Semakin mendekati angka 1 (satu), berarti semakin timpang sedangkan semakin mendekati angka 0 (nol) berarti semakin merata pendapatan diantara penduduk pada suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan ini dapat terjadi karena kesenjangan antar individu, kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan antar sektor.

Sasaran kedua, meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian, dengan 6 (enam) indikator, yaitu: lama tinggal wisatawan, jumlah kunjungan wisatawan, nilai ekspor, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, nilai tukar petani serta persentase peningkatan nilai produksi industri.

Pada tahun 2018, lama tinggal wisatawan nusantara sebanyak 1,86 hari lebih tinggi dari target tahun rencana, 1,65 hari, dan wisatawan mancanegara 2,04 hari lebih tinggi dari target tahun rencana, 2,02 hari. Semakin lama seorang wisatawan tinggal, pengeluaran yang dibelanjakan juga semakin banyak. Harapannya adalah para wisatawan ini lebih banyak berkunjung ke destinasi wisata yang berbasis masyarakat, sehingga lama tinggalnya pun mendongkrak pemasukan bagi masyarakat, seperti homestay, desa wisata, dll.

Jumlah kunjungan baik wisnus maupun wisman di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sebanyak 8.531.738 orang, yang terdiri dari 8.224.033 wisnus dan 307.705 wisman. Destinasi wisata yang menjadi lokasi kunjungan wisatawan antara lain wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Dari ketiga jenis wisata, yang paling banyak dikunjungi adalah wisata budaya.

Nilai ekspor sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 41.963.299,13 US\$, tidak mencapai target (43.000.000 US\$). Hal ini dikarenakan para eksportir menggunakan nama perusahaan dari luar wilayah Sleman, sehingga produk ekspor tidak terekap di Kabupaten Sleman. Persyaratan TDP (tanda daftar perusahaan) banyak yang terkendala dengan perijinan, seperti IMB untuk lahan usaha yang menggunakan lahan hijau. Selain itu, beberapa perusahaan berorientasi ekspor pindah lokasi dan tutup usaha. Tahun 2016, ada 7 perusahaan pindah lokasi dan 14 perusahaan tutup, dan tahun 2017, tambah satu perusahaan yang tutup.

Pada tahun 2018, peningkatan produksi pertanian dan perikanan di Kabupaten Sleman sebesar 6,62 persen. Sedangkan, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 119,02. NTP ini merupakan rasio antara harga produk pertanian yang dihasilkan dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi oleh petani. NTP menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani.

Persentase peningkatan nilai produksi industri pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 3,05 persen, atau mencapai 105,17 persen dari target 2018. Berdasarkan PDRB Harga Berlaku tahun 2017, kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 13,21 persen. Harapannya bahwa sektor industri pengolahan didominasi oleh industri pengolahan yang berbasis masyarakat (potensi lokal).

Sasaran ketiga, meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator tingkat pengangguran terbuka. Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2018 sebanyak 830.853 orang. Dari



jumlah tersebut, yang termasuk angkatan kerja 601.569 orang dan yang bukan angkatan kerja 229.284 orang. Dari angka tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 74,83 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,76 persen lebih tinggi dari target tahun 2018, 5,80 persen. Hal tersebut tercapai karena adanya kemitraan yang baik antara pemerintah, perusahaan dan tenaga kerja (tripartit). Kerjasama ini menciptakan iklim yang kondusif di tempat kerja, sehingga mengurangi jumlah demo dan PHK.

Dinas Tenaga Kerja telah mengadakan layanan informasi lowongan kerja melalui *job fair* 2 kali, bursa kerja online 1.566 pengguna dan Sistem Pelayanan Informasi Pasar Kerja Keliling (Sarkeling) di 40 lokasi. Berdasarkan data penempatan tenaga kerja, penempatan lokal masih menempati urusan terbesar, 1.555 orang. Sedangkan untuk penempatan kerja antar daerah, 186 orang dan penempatan kerja antar negara, 498 orang. Masih tingginya angka pengangguran terbuka mempunyai dampak sosial yang luas, terutama terhadap potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Beberapa permasalahan terkait dengan prioritas mewujudkan kemandirian dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing di pasar internasional adalah :

- a. Masih terdapat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sleman;
- b. Belum optimalnya daya saing sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan industri;
- c. Masih tingginya angka pengangguran; serta
- d. Jumlah dan lama tinggal wisatawan masih perlu ditingkatkan.

### **3. Meningkatkan kualitas infrastruktur**

Prioritas ini hanya terdiri dari satu sasaran, yaitu meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dengan 2 (dua) indikator, yaitu: persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas serta

persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap didukung prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai.

Pada tahun 2018, prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas mencapai 76,75 persen. Indikator ini didukung oleh sarana dan prasarana ekonomi (pasar dan obyek wisata), sarana dan prasarana jaringan irigasi dan pengairan lainnya, infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh dan infrastruktur perdesaan.

Sedangkan persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, pada tahun 2018 mencapai 82,45 persen atau 125,59 persen dari target 2018 (65,65 persen) serta didukung prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai 89,38 persen atau 121,26 persen dari target 2018 (73,71 persen). Indikator ini selain didukung oleh kondisi fisik jalan dan jembatan, juga didukung oleh sarana prasarana perhubungan, kondisi kendaraan serta fasilitas lalu lintas angkutan jalan. Meskipun sudah melampaui target, persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sleman masih perlu ditingkatkan agar kinerja jalan dan jembatan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan penyelenggaraannya, dan memenuhi aspek aksesibilitas, aspek mobilitas dan aspek keselamatan.

Permasalahan yang masih ditemukan di dalam prioritas meningkatkan kualitas infrastruktur adalah:

- a. Kondisi fisik sebagian besar pasar tradisional masih belum baik;
- b. Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana pariwisata;
- c. Masih banyak jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat dan sedang; serta
- d. Prasarana sarana kenyamanan lalu lintas masih perlu ditingkatkan.

#### **4. Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa**

Dalam prioritas ini terdapat satu sasaran, yaitu menurunnya kemiskinan dengan indikator persentase KK miskin. Pada Maret 2018, garis kemiskinan yang menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan

(setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari) dan kebutuhan pokok bukan makanan di Kabupaten Sleman sebesar Rp. 370.127,00.

Tahun 2018, persentase KK miskin 8,77 persen, atau capaian realisasi fisik sebesar 106,20 persen. Kecamatan dengan persentase KK miskin terbesar terdapat di Kecamatan Seyegan, Kecamatan Minggir dan Kecamatan Tempel. Ketiganya merupakan wilayah pertanian. Penurunan persentase kemiskinan ini didukung oleh pemutakhiran data kemiskinan yang dilakukan 2 kali setahun serta intensnya program penanganan kemiskinan. Program tersebut antara lain Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), KUBE, PRSE, LUT serta Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Dan target persentase KK miskin pada tahun 2021 adalah 8 persen.

Beberapa permasalahan terkait dengan prioritas pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa adalah:

- Pemberian jaminan sosial yang kurang tepat sasaran;
- Rendahnya pendapatan penduduk miskin; serta
- Terbatasnya akses penduduk miskin terhadap lapangan kerja.

## **5. Meningkatkan kualitas hidup manusia**

Dalam prioritas ini terdapat 2 (dua) sasaran, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; serta
- b) meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan.

Sasaran pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja usia harapan hidup. Pada tahun 2018, usia harapan hidup di Kabupaten Sleman mencapai 74,63 tahun, naik dari capaian tahun 2017, 74,56 tahun. Hal ini karena adanya kerjasama yang baik antar program maupun antar sektor mulai dari Dinas Kesehatan, PKK, desa, kecamatan, klinik, rumah sakit dan lainnya sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat.

Walaupun demikian, angka usia harapan hidup ini masih perlu ditingkatkan lagi karena angka ini menjadi indikator kemampuan

pemerintah menjaga kesehatan rakyat, kemampuan pemerintah dalam fasilitasi kesehatan, kecukupan gizi, dan kesehatan lingkungan.

Sasaran kedua, meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs, harapan rata-rata lama sekolah, rata-rata lama sekolah; dan nilai rata-rata ujian SD/MI, SMP/MTs.

Pada tahun 2018, APK PAUD mencapai 81,47 persen, APK jenjang SD/MI mencapai 116,98 persen, serta APK jenjang SMP/MTs mencapai 112,71 persen. APM SD/MI tahun 2018 mencapai 105,67 persen, meningkat dari capaian tahun 2017 (104,61 persen). Sedangkan APM SMP/MTs tahun 2018 mencapai 85,91. Nilai APK (Angka Partisipasi Kasar) bisa lebih dari 100 persen, karena APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dengan menghitung rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia tersebut.

Harapan rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 mencapai 16,48 tahun lebih tinggi dari target sebesar 15,78 atau setara usia pendidikan sarjana. Sedangkan rata-rata lama sekolah tahun 2018 meningkat dari 10,64 pada tahun 2017 menjadi 10,65 (setara usia pendidikan SMA). Angka tersebut lebih tinggi dari target tahun 2018, 10,39 tahun. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Sleman tetap perlu meningkatkan sarana prasarana pendidikan, mutu pendidik dan tenaga kependidikannya maupun mutu pelayanan pendidikan.

Pada tahun 2018, nilai rata-rata ujian SD/MI mencapai 211,05, sedangkan nilai rata-rata ujian SMP/MTs mencapai 256,50. Nilai ini masih lebih rendah dari target tahun 2018, yaitu 236,2 untuk SD/MI dan 261,68 untuk SMP/MTs. Meskipun realisasi kinerja tidak mencapai target, namun Kabupaten Sleman menduduki peringkat II peraih nilai rata-rata tertinggi untuk jenjang SD dan SMP se DIY. Hal

ini dikarenakan ada perbedaan tingkat pemahaman siswa, tingkat kesulitan soal ujian dan kondisi fisik maupun mental masing-masing individu siswa pada saat ujian di setiap tahun ajaran.

Permasalahan yang masih ditemukan di dalam prioritas meningkatkan kualitas hidup manusia adalah:

- a. Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dalam melayani pasien di RS dan Puskesmas dan penjangkauan kesehatan sebagai amanat dari program pemerintah Program Indonesia Sehat dan Penjangkauan Keluarga;
- b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan di RS dan puskesmas;
- c. Masih adanya kematian ibu melahirkan, bayi dan anak balita;
- d. Masih adanya penyakit menular yang berpotensi KLB;
- e. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- f. Belum optimalnya prasarana dan sarana pendidikan; serta
- g. Kurangnya tenaga pendidik sekolah dasar sesuai dengan standar pelayanan Pendidikan.

#### **6. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan**

Dalam prioritas ini terdapat 2 (dua) sasaran, yaitu:

- a) meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana; dan
- b) meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Sasaran pertama, meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dengan indikator jumlah lembaga tangguh bencana. Dalam RTRW Kabupaten Sleman, wilayah kawasan rawan bencana tersebar di hampir semua wilayah Kabupaten Sleman yang meliputi: bencana tanah longsor, bencana kekeringan, bencana gunung api dan bencana gempa bumi. Pada tahun 2018, lembaga tangguh bencana mencapai 45 desa dan 55 sekolah. Angka ini sudah melebihi target tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya dukungan program dan kegiatan dari BPBD DIY terkait Destana (Desa Tangguh Bencana) dan SSB (Sekolah Siaga Bencana). Namun harapannya,

dalam waktu yang tidak lama, Destana dapat terbentuk di 86 desa, mengingat Kabupaten Sleman mempunyai potensi kebencanaan.

Sasaran kedua, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indeks ini terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu: indeks pencemaran air sungai, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan. Semakin tinggi angka indeks, semakin tinggi kualitas lingkungannya. Pada tahun 2018, IKLH Kabupaten Sleman mencapai angka 49,60. Dalam klasifikasi yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kondisi IKLH Kabupaten Sleman masuk kategori WASPADA. Capaian IKLH Kabupaten Sleman masih rendah dikarenakan banyaknya sungai yang sudah tercemar oleh e-Coli.

Untuk pemantauan pencemaran sungai dilakukan di sejumlah titik dengan dua kali pengujian, pada musim kemarau dan musim penghujan. Pada tahun 2018, indeks pencemaran air sungai di Kabupaten Sleman mencapai angka 41,33. Nilai indeks ini lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Secara geografis, banyak sungai yang berhulu di gunung api Merapi dan bermuara di pantai selatan. Kondisi air sungai di Kabupaten Sleman akan berpengaruh terhadap kondisi air pada wilayah di bawahnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Bantul. Oleh karena itu, kelas sungai di wilayah Sleman ditetapkan sebagai kelas I, yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, yang artinya mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Oleh karena itu, angka indeks ini harus ditingkatkan dengan pengolahan air limbah dan sampah yang baik serta memperbaiki pola hidup sehat (tidak BAB sembarangan, tidak buang sampah sembarangan, dan sebagainya).

Untuk pemantauan pencemaran udara dilakukan dengan metode passive sampler dengan memasang alat di lokasi pemantauan selama 2 (dua) minggu, bukan dengan pemantauan udara ambien (udara sesaat). Pada tahun 2018, indeks pencemaran udara mencapai 78,77, turun dari capaian tahun 2017, 81,11, namun tetap melebihi target 2017 (indeks 42). Pencemaran udara disebabkan oleh faktor

alam, seperti abu vulkanik, kebakaran hutan serta faktor manusia. Faktor yang berasal dari manusia berupa emisi bergerak seperti asap kendaraan bermotor serta emisi tidak bergerak seperti asap pabrik. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, maka semakin banyak juga emisi yang ditimbulkan. Pencemaran udara ini berdampak pada timbulnya berbagai penyakit pernafasan maupun gangguan kesehatan lainnya. Selain kesehatan, pencemaran ini juga berdampak pada ekonomi, sosial, pendidikan dan pertanian. Oleh karena itu, transportasi massal adalah salah satu solusinya.

Indeks tutupan hutan merupakan perbandingan antara luas tutupan hutan dan luas wilayah. Tutupan hutan ini terdiri dari hutan rakyat, hutan konservasi dan ruang terbuka hijau (RTH) publik. Pada tahun 2018, indeks tutupan hutan mencapai 34,42. Meskipun sudah melebihi target, indeks ini perlu ditingkatkan dengan memperbanyak RTH di wilayah perkotaan, baik publik maupun privat, terutama karena Kabupaten Sleman merupakan kawasan resapan air.

Beberapa permasalahan yang ditemukan terkait prioritas meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kemampuan masyarakat terhadap upaya pengurangan resiko bencana;
- b. Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran;
- c. Masih belum optimal infrastruktur yang berhubungan dengan penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Kurangnya luasan RTH, baik publik maupun privat;
- e. Tingkat kualitas air belum memadai dikarenakan sumber dan mata air yang tercemar e-coli; serta
- f. Belum optimalnya pengelolaan sampah.

#### **7. Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender**

Dalam prioritas ini terdapat 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- a) meningkatnya kerukunan masyarakat;

- b) meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya; dan
- c) meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sasaran pertama, meningkatnya kerukunan masyarakat dengan indikator penurunan jumlah konflik SARA. Pada tahun 2018, target konflik SARA kurang dari 4 kasus dan kenyataannya, tidak ada kejadian konflik SARA di Kabupaten Sleman. Meskipun keberagaman di Kabupaten Sleman sangat tinggi, namun tetap bersatu karena rasa toleransi dan kepedulian masih cukup kuat di masyarakat. Namun perlu diwaspadai bahwa saat ini mulai tumbuh intoleransi di dalam masyarakat. Ada beberapa hal penyebab intoleransi, seperti gangguan politik dan paham-paham dari luar. Selain itu, pola pikir yang terbentuk sejak kecil bahwa setiap pertanyaan selalu mengarah pada satu jawaban sehingga jika ada jawaban yang berbeda maka dianggap salah. Kabupaten Sleman yang merupakan tempat bermukim para pelajar, menjadi rawan intoleransi karena proses adaptasi budaya luar dengan budaya Jawa yang memang berbeda.

Sasaran kedua, meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dengan indikator persentase pelestarian warisan budaya. Persentase ini dihitung dari jumlah warisan budaya yang dilestarikan dibagi dengan jumlah warisan budaya keseluruhan. Pada tahun 2018, capaian persentase pelestarian warisan budaya sebesar 30,50 persen. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya tersebut terbentuk dari banyak unsur, seperti agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Budaya ini bukan hanya sekedar budaya tangible tetapi juga intangible, seperti etika tata krama. Menggejala di masyarakat bahwa kebersamaan dan kegotongroyongan semakin hari semakin berkurang, sehingga gesekan sosial menjadi lebih mudah terjadi di kalangan masyarakat.



Sasaran ketiga, meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan indikator penurunan persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka ini merupakan perbandingan antara selisih kasus kekerasan tahun evaluasi dan tahun sebelumnya dengan jumlah kasus kekerasan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, kasus kekerasan yang terjadi berjumlah 471 kasus. Sedangkan untuk tahun 2018, kasus kekerasan yang terjadi sebanyak 458, sehingga ada penurunan 13 kasus atau sebesar 2,76 persen. Sebenarnya angka ini, belum menunjukkan angka riil tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena angka ini merupakan jumlah dari kasus yang dilaporkan. Angka jumlah kasus kekerasan didapatkan dari instansi dan lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya puskesmas, kepolisian, KUA, serta kader PKDRT di setiap desa. Masih dimungkinkan adanya kasus kekerasan yang tidak dilaporkan maupun kasus yang dilaporkan di luar wilayah Sleman, sehingga tidak terhitung sebagai data kasus di Sleman. Tindak kekerasan ini dipicu oleh banyak faktor, seperti ekonomi maupun karakter kepribadian si pelaku. Korban terbanyak berpendidikan SMA, disusul oleh perguruan tinggi. Disini terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan tidak menjamin kestabilan mental seseorang. Sehingga sangat diperlukan penerapan pendidikan berkarakter sejak dini serta pengamalan nilai-nilai moral budi pekerti, baik dari agama maupun budaya.

Permasalahan yang terkait dengan prioritas meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender yang masih ditemukan adalah:

- a. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan;
- b. Belum optimalnya kelembagaan PUG;
- c. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Potensi konflik SARA semakin meningkat;
- e. Belum optimalnya pembinaan kebudayaan yang berorientasi pada budaya intangible yang berupa nilai-nilai luhur; serta
- f. Terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka tema pembangunan kabupaten Sleman tahun 2020 yang dituangkan dalam dokumen RKPD tahun 2020 adalah **“Memantapkan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya”**, yang kemudian dijabarkan dalam prioritas pembangunan pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan;
2. Budaya;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pengembangan potensi lokal;
7. Infrastruktur;
8. Lingkungan Hidup.

Delapan prioritas pembangunan Kabupaten Sleman tersebut merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 serta RKPD tahun 2020, yang selanjutnya diformulasikan kedalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2020. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, kebijakan nasional dan regional, penjaringan aspirasi masyarakat baik yang dilakukan eksekutif maupun legislatif.

## **2. Tujuan**

- a. Tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
- b. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah.

## **3. Dasar Hukum**

Landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - n. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031.
  - o. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
  - p. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.
  - q. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

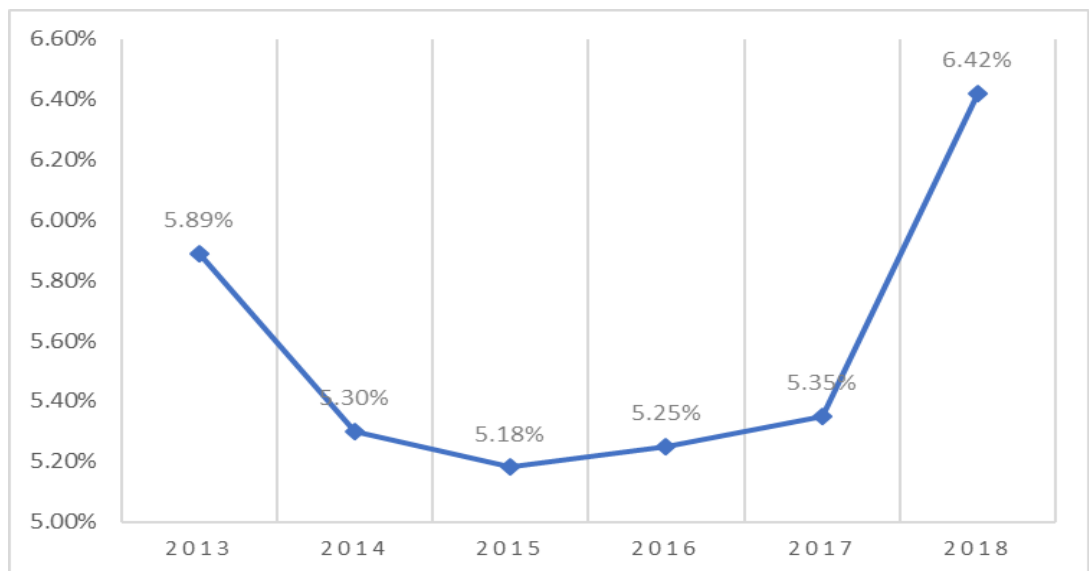
## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun 2014-2019

##### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Berdasarkan angka realisasi yang diambil dari tahun 2013 sebesar 5,89%, tahun 2014 sebesar 5,30%, tahun 2015 sebesar 5,18%, tahun 2016 sebesar 5,25%, tahun 2017 sebesar 5,35%, dan pencapaian PDRB tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 6,42%. Secara grafis data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman ditunjukkan pada Gambar 2.1.



Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan PDRB adalah sektor Konstruksi (6,95%), sektor Informasi dan Telekomunikasi (6,37%), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (6,14%) serta sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,03%) dan sektor Jasa Perusahaan (5,79%).

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2017 tumbuh sebesar 1,09%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 1,12%. Selain sektor Pertanian, Kehutanan

dan Perikanan, sektor lain yang pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal inilah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman, sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman masih harus bekerja keras dalam meningkatkan sektor yang mengalami penurunan tersebut, karena sektor inilah yang akan memberikan imbas yang luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Pertumbuhan Sektor dan PDRB Tahun Harga Konstan**  
**Tahun 2013-2017 Kabupaten Sleman**

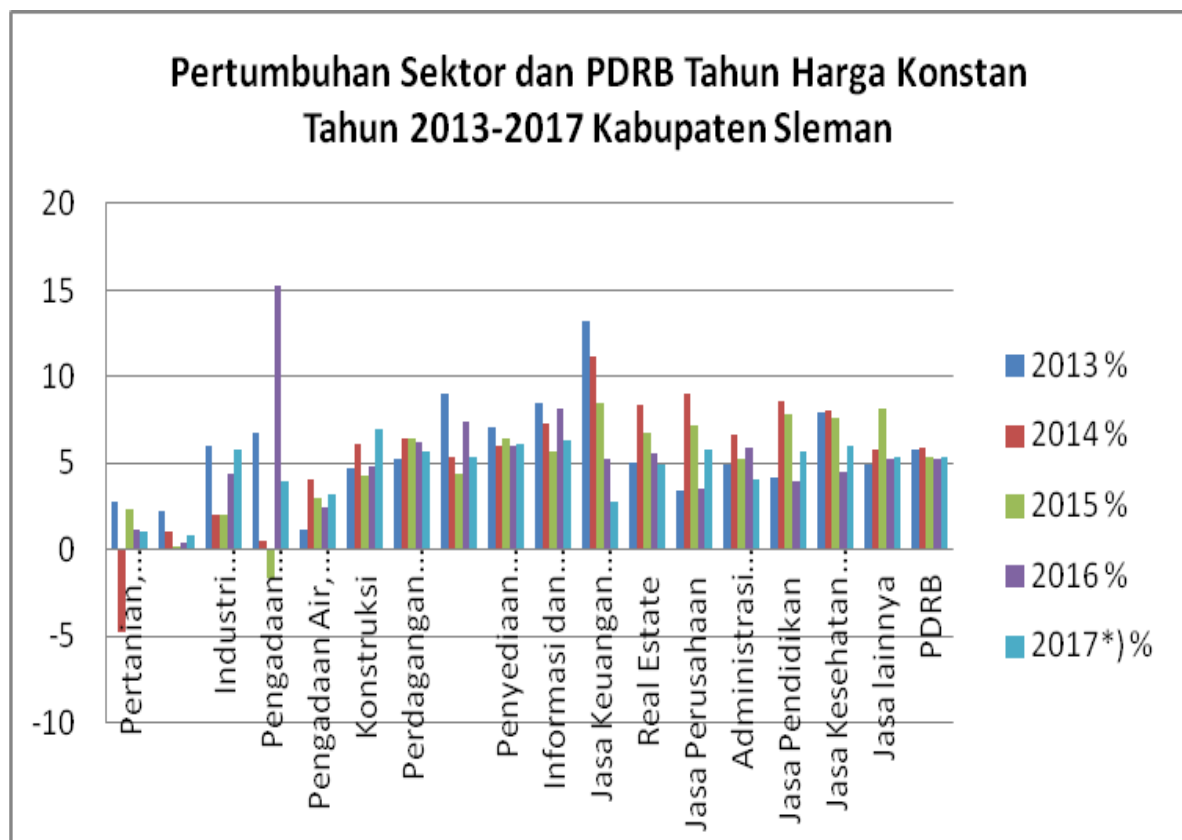
Kategori	Uraian	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 <sup>a)</sup> %
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,74	-4,76	2,37	1,12	1,09
B	Pertambangan dan Penggalan	2,28	1,01	0,17	0,43	0,79
C	Industri Pengolahan	6,01	2,04	2,03	4,42	5,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,71	0,46	-1,61	15,27	3,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,17	4,02	3,02	2,40	3,25
F	Konstruksi	4,74	6,14	4,28	4,77	6,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,27	6,45	6,43	6,26	5,69
H	Transportasi dan Pergudangan	9,03	5,40	4,41	7,39	5,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,12	6,02	6,38	5,98	6,14
J	Informasi dan Komunikasi	8,45	7,25	5,69	8,19	6,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,17	11,13	8,49	5,27	2,79
L	Real Estate	5,00	8,37	6,75	5,52	4,95

Kategori	Uraian	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 <sup>*)</sup> %
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
M,N	Jasa Perusahaan	3,37	9,03	7,13	3,55	5,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,96	6,60	5,20	5,89	4,10
P	Jasa Pendidikan	4,21	8,57	7,88	3,98	5,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,94	8,01	7,65	4,47	6,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,92	5,80	8,19	5,24	5,40
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,79</b>	<b>5,30</b>	<b>5,18</b>	<b>5,25</b>	<b>5,34</b>

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2017

\*) Angka proyeksi

Secara grafis data pertumbuhan ekonomi per sektor dan PRDB Kabupaten Sleman ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman  
Sumber : BPS 2017, BKAD Sleman 2019

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2017, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan yaitu sebesar 13,21%, dan yang paling rendah adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,05%. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Sleman selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha**  
**ADH Berlaku Tahun 2013-2017 Kabupaten Sleman**

Kategori	Uraian/Sektor	2013		2014		2015		2016		2017 <sup>1)</sup>	
		(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.534.773,3	8,96	2.574.199,3	8,35	2.855.879,0	8,46	2.983.069,20	8,06	3.085.181,1	7,75
B	Pertambangan dan Penggalian	122.599,9	0,43	137.850,2	0,45	147.413,2	0,44	152.576,60	0,41	154.658,4	0,39
C	Industri Pengolahan	4.021.392,5	14,21	4.310.924,1	13,99	4.539.798,3	13,45	4.943.591,40	13,36	5.319.570,1	13,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24.296,8	0,09	24.641,2	0,08	25.325,8	0,08	38.680,50	0,10	47.254,3	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.052,2	0,05	16.069,8	0,05	17.198,3	0,05	17.992,70	0,05	19.091,4	0,05
F	Konstruksi	3.109.586,7	10,99	3.339.673,5	10,84	3.631.128,5	10,76	3.960.104,00	10,71	4.376.658,9	10,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.103.955,9	7,44	2.292.696,9	7,44	2.507.164,1	7,43	2.883.199,60	7,79	3.160.224,6	7,85
H	Transportasi dan Pergudangan	1.929.376,7	6,82	2.164.299,8	7,02	2.379.991,0	7,05	2.691.431,90	7,28	2.973.830,1	7,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.796.604,3	9,88	3.086.048,1	10,02	3.458.076,4	10,24	3.803.368,40	10,28	4.144.322,4	10,34
J	Informasi dan Komunikasi	2.470.222,7	8,73	2.612.761,5	8,48	2.731.066,7	8,09	2.961.884,70	8,01	3.244.700,3	8,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	860.246,4	3,04	992.908,7	3,22	1.114.723,3	3,37	1.200.882,6	3,26	1.280.249,9	3,18
L	Real Estate	2.129.836,5	7,53	2.383.940,9	7,74	2.629.348,2	7,93	2.923.612,00	7,90	3.142.737,1	7,80
M,N	Jasa Perusahaan	470.231,8	1,66	528.106,6	1,71	578.396,9	1,75	618.775,80	1,67	670.736,7	1,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.796.460,4	6,35	2.021.715,0	6,56	2.251.056,6	6,79	2.520.298,80	6,81	2.782.811,3	6,87



Kategori	Uraian/Sektor	2013		2014		2015		2016		2017 <sup>*)</sup>	
		(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%	(juta Rp)	%
P	Jasa Pendidikan	2.644.487,8	9,35	2.943.821,9	9,55	3.346.591,6	10,10	3.576.688,40	9,67	3.815.058,6	9,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	646.475,9	2,28	701.977,8	2,28	791.283,7	2,39	868.505,40	2,35	947.351,6	2,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	620.762,9	2,19	680.848,8	2,21	751.294,1	2,27	842.093,90	2,28	923.008,3	2,30
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>28.295.362,8</b>	<b>100,0</b>	<b>30.912.238,7</b>	<b>100,0</b>	<b>33.826.505,4</b>	<b>100,0</b>	<b>36.939.695,9</b>	<b>100,0</b>	<b>40.087.444,9</b>	<b>100,0</b>

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2018

\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Berdasarkan data diatas, industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan pertumbuhan produksi dari sektor UMKM kita memberikan kontribusi yang tinggi dalam pembentukan PDRB. Yang harus dilakukan adalah mengupayakan agar industri pengolahan ini terus tumbuh mengimbangi pertumbuhan sektor konstruksi dan jasa. Selain itu, sektor pertanian, pertumbuhan dan kontribusinya dibawah industri pengolahan, perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian masih sangat diperlukan mengingat sektor ini cukup strategis terutama terkait dengan ketahanan pangan daerah.

#### **b. PDRB Perkapita**

PDRB perkapita menurut harga berlaku (Hb) selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 sebesar Rp24,78 juta, pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp33,59 juta.

PDRB perkapita menurut harga konstan (hk) juga cenderung mengalami kenaikan antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Angka pada tahun 2013 sebesar Rp22,22 juta, pada tahun 2017 sebesar Rp26,10 juta. PDRB per kapita selama 5 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**PDRB Per Kapita Tahun 2013 - 2017 Kabupaten Sleman (juta)**

No	PDRB	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016*)	2017**)
1.	Hb	24,78	26,78	28,97	31,34	33,59
2.	Hk	22,22	23,16	24,06	25,05	26,10

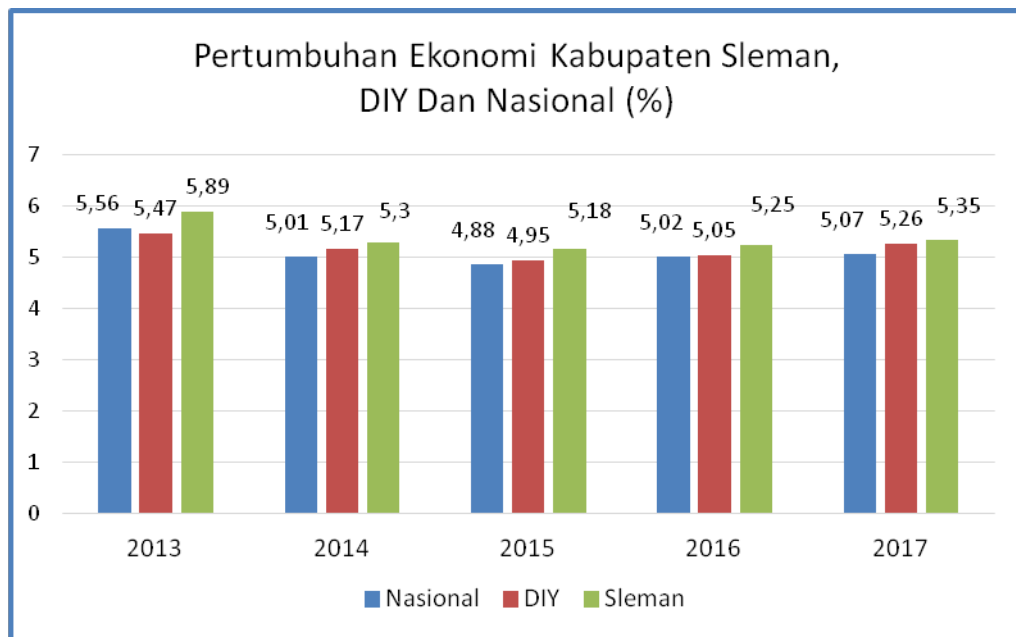
Sumber: BPS Kab. Sleman, 2018

\*) Angka sementara

\*\*) angka sangat sementara

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman selama dua tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,89%, kemudian berturut-turut menurun pada tahun 2014 sebesar 5,30%, tahun 2015 sebesar 5,18%, dan pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 5,25%. Capaian pada tahun 2017 sebesar 5,35%. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sulit diprediksi karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman dapat dilihat seperti gambar diagram berikut ini:



Sumber : BPS Tahun 2018

\*) Angka proyeksi

**Gambar 2.3** Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional (%)

#### **d. Laju Inflasi**

Pada tahun 2017, angka inflasi lebih tinggi dari angka nasional serta mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 2,29% menjadi 4,2%, sementara angka inflasi nasional sebesar 3,61% di tahun 2017.

Pada tahun 2018, Kabupaten Sleman telah melakukan perhitungan angka inflasi, tercatat sebesar 2,79% untuk periode bulan November 2018. Angka ini lebih rendah dari angka inflasi nasional pada tahun yang sama sebesar 3,23%. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan di Wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi. Perkembangan inflasi selama lima tahun secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.4.

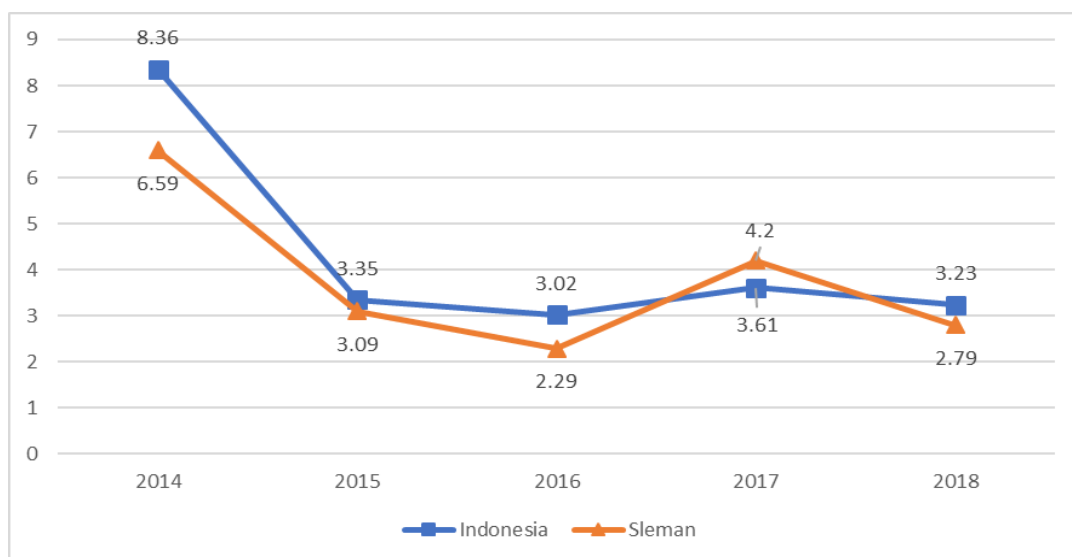
**Tabel 2.4**  
**Nilai inflasi Rata-rata Tahun 2014 s.d 2018**  
**Kabupaten Sleman (%)**

<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Rata-rata</b>
Inflasi (%)	6,59	3,09	2,29	4,2	2.79	3.79

Sumber: BPS Kab. Sleman, 2018

\*) Angka proyeksi

Laju inflasi antara Nasional dan Kabupaten Sleman selama lima tahun secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.4.



**Gambar 2.4 Laju Inflasi Kabupaten Sleman Tahun 2014 s.d 2018 (%)**  
**Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia 2018**

#### e. Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah  **$G < 0,30$**  berarti ketimpangan rendah,  **$0,30 \leq G \leq 0,50$**  berarti ketimpangan sedang dan  **$G > 0,50$**  berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2014-2017 angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan

sedang. Pada tahun 2015, angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman semakin membesar apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman semakin membesar atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin timpang. Namun pada tahun 2016, angka indeks gini menurun menjadi 0,39 yang berarti ketimpangan semakin mengecil. Pada tahun 2017 angka indeks gini sebesar 0,41, yang berarti terdapat peningkatan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, termasuk pada kategori ketimpangan moderat. Angka ini juga lebih besar dibandingkan angka nasional sebesar 0,39, meskipun lebih rendah dari angka DIY sebesar 0,43. Perkembangan angka Indeks Gini dapat dilihat pada pada tabel berikut ini :

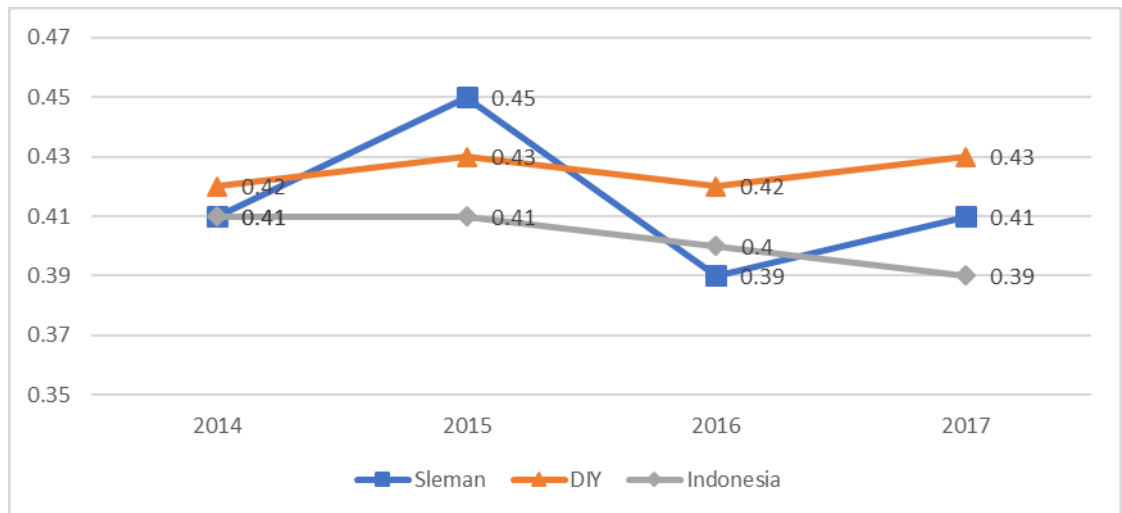
**Tabel 2.5**  
**Indeks Gini Tahun 2012-2017 Kabupaten Sleman**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Indeks Gini</b>
1.	2014	0,41
2.	2015	0,45
3.	2016	0,39
4.	2017	0,41

Sumber : BPS Kabupaten Sleman, 2018

\*) Angka proyeksi

Perkembangan angka Indeks Gini dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.5 Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2014-2017**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017*

Semakin meningkatnya angka indeks gini di kabupaten Sleman ini menjadi pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman. Langkah inilah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sleman. Adapun faktor lain yang sulit dikendalikan adalah adanya faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan diatas rata-rata penghasilan masyarakat golongan rendah.

#### **f. Investasi**

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2018 meliputi investasi PMA sebanyak 80 unit dengan nilai investasi US\$ 193.830.919 dan

investasi PMDN 88 unit dengan nilai investasi Rp5.584,260,- juta. Adapun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 161,307 dari tahun sebelumnya sebesar 167,257, tahun 2016 sebesar 174,103 dan 188,814 di tahun 2015. Meskipun terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN dari 12,24% di tahun 2017 menjadi 43,43%, apabila melihat rasio daya serap tenaga kerja, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, sehingga perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Wilayah Kabupaten Sleman. Kemampuan maupun keterampilan dari tenaga kerja yang memadai menjadi prasyarat yang utama dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja di bidang usaha.

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman tahun 2014-2018 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perkembangan Penanaman Modal**  
**Tahun 2014-2018 Kabupaten Sleman**

	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Investor	90	108	126	132	168
PMDN	45	51	60	64	88
PMA	45	57	66	68	80
Nilai Investasi PMDN (Juta Rupiah)	1.945.867	3.159.444	3.370.881	3.893.334	5.584.260
Nilai Investasi PMA (US \$)	31.963.753	33.545.997	233.587.774	35.336.556	193.830.919
Penyerapan Naker	193.488	188.814	174.103	167.257	161.307
Rasio daya serap naker	193	189	174	167	161

Sumber : DPMPTT Kab. Sleman, 2018.

Kabupaten Sleman menjadi salah satu tujuan lokasi investasi yang menarik bagi para investor. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sleman:

1. Memiliki 5 perguruan tinggi negeri dan banyak perguruan tinggi swasta yang terkemuka.
2. Letak Kabupaten Sleman yang menjadi pintu masuk dari berbagai daerah (pintu masuk timur dan utara), jalan nasional Jogja-Solo dan Jogja-Semarang.
3. Kedekatan dengan Bandara Internasional Adisucipto karena bandara tersebut masuk wilayah Sleman.
4. Adanya fasilitas kesehatan yang memadai (1 RSUP, 2 RSUD, dan banyak RS Swasta dengan peralatan kedokteran yang lengkap dan canggih).

Meskipun Kabupaten Sleman menjadi tujuan lokasi investasi yang menarik bagi investor, namun berdasarkan tabel 2.6, rasio daya serap tenaga kerja malah semakin menurun angkanya sejak tahun 2015. Hal ini disebabkan karena kualitas tenaga kerja sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya SDM di Kabupaten Sleman.

Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan rasio daya serap, maka Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan upaya:

1. Meningkatkan koordinasi dengan dunia pendidikan untuk memberikan input kurikulum kompetensi *hardskill* dan *softskill*.
2. Meningkatkan koordinasi dengan dunia kerja (perusahaan) untuk publikasi lowongan dan *training*.
3. Memperbanyak Pelatihan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai maupun siap usaha mandiri.

#### **g. Ketenagakerjaan**

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Pembangunan ekonomi mampu menyerap sebagian tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Pada tahun 2017, angkatan kerja berjumlah



604.701 orang, terdiri dari bekerja 569.750 orang (94,22%) dan menganggur 34.951 orang (5,78%). Pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja 601.570 orang yang terdiri dari bekerja 566.891 orang (94,23%) dan menganggur 34.678 orang (5,76%). Dibandingkan kondisi tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 lebih rendah atau turun 0,02% dari 5,78% pada tahun 2017 menjadi 5,76% pada tahun 2018. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014-2018**  
**Kabupaten Sleman**

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Penduduk Usia Kerja	861.472	829.355	852.884	841.227	830.851
2.	Angkatan Kerja	560.772	569.584	590.443	604.701	726.712
	- Bekerja	526.171	534.725	556.083	569.75	566.891
	- Penganggur Terbuka	34.601	34.859	34.360	34.951	34.679
3.	Bukan Angkatan Kerja	300.700	259.771	262.441	236.526	229.283
4.	TPAK (%)	65,09	68,68	69,23	71,78	72.40
5.	Tingkat pengangguran terbuka	6,17	6,12	5,82	5,78	5.76

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, 2018

Lapangan usaha sebagai sumber penyerapan tenaga kerja daerah tumbuh variatif sehingga kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja cukup fluktuatif. Sektor pertanian sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan dan jasa serta sektor listrik, air dan gas mengalami kenaikan, sedangkan sektor industri pengolahan dan jasa-jasa mengalami penurunan.

Pada tahun 2018, sebagian besar penduduk di Kabupaten Sleman bekerja di sektor pertanian serta jasa-jasa yang masing-masing menyerap 124.992 orang dan 112.945 orang secara berturut-turut. Sektor lainnya yang relatif besar menyerap tenaga kerja adalah sektor Keuangan dan Jasa Perusahaan serta Perdagangan dan Hotel yang masing-masing menyerap 88.299 orang dan 83.561 orang.

## **2. Rencana dan target ekonomi makro pada tahun 2019 dan 2020**

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Kabupaten Sleman pada tahun 2012 sebesar Rp25,732 trilyun, kemudian meningkat menjadi Rp28,295 trilyun pada tahun 2013, dan meningkat lagi menjadi Rp30,812 trilyun pada tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi Rp33,756 trilyun. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi lebih besar lagi yakni Rp36,939 trilyun. Tahun 2017 naik menjadi Rp40.087 trilyun, dan diproyeksikan tahun 2018 sebesar Rp43,601 trilyun dan tahun 2019 sebesar Rp47,359.

Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK 2010), PDRB Kabupaten Sleman pada tahun 2012 sebesar Rp23,957trilyun, naik manjadi Rp25,367 trilyun pada 2013 dan Rp26,740 trilyun pada 2014. Pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp28,159 trilyun dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp29,573 trilyun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp31,155 trilyun dan Tahun 2018 diperkirakan sebesar 32,770 trilyun serta sebesar Rp34,500 trilyun pada tahun 2019.

Struktur perekonomian daerah selama lima tahun terakhir cenderung tidak berubah. Pada tahun 2016 sektor terbesar disumbangkan dari sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 13,21%, sedangkan sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,05%. Lima sektor pendukung utama perekonomian Kabupaten Sleman adalah sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Pendidikan, dan Informasi dan Komunikasi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2014 mencapai 5,89%, namun pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 5,30%. Sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi adalah 5,25%. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 5,35%, tahun 2018 sebesar 5,50%. Diperkirakan tahun 2019 sebesar 5,48% dan tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,55%.

Jika dilihat dari kontribusi sektor PDRB yang terbesar yaitu sektor industri pengolahan, merupakan peluang yang besar untuk terus mendorong pertumbuhan industri pengolahan berbasis UMKM. Pengembangan UMKM yang berbasis potensi ekonomi lokal diharapkan menimbulkan efek berantai bagi kesejahteraan pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Pemberdayaan UMKM ini diharapkan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi penekan semakin melebarnya indeks gini.

#### **b. Inflasi**

Tingkat inflasi di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 3,09% menjadi 2,29% pada tahun 2016, tahun 2017 sebesar 4,2%. Pada tahun 2018, Kabupaten Sleman telah melakukan perhitungan angka inflasi, tercatat sebesar 2,79% untuk periode bulan November 2018. Angka ini lebih rendah dari angka inflasi nasional

pada tahun yang sama sebesar 3,23%. Adapun tahun 2019 dan tahun 2020 diharapkan tidak melebihi tahun 2018.

### **c. Investasi**

Investasi merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Disamping untuk mendorong perekonomian daerah, peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2012 hingga 2017 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif.

Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2018 meliputi investasi PMA sebanyak 80 unit dengan nilai investasi US\$ 193.830.919 dan investasi PMDN 88 unit dengan nilai investasi Rp5.584,260,- juta. Adapun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 161,307 dari tahun sebelumnya sebesar 167,257, tahun 2016 sebesar 174,103 dan 188,814 di tahun 2015.

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 masih dibutuhkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kebutuhan investasi tersebut lebih diarahkan kepada investasi yang mengakomodir sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia serta yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Diharapkan investasi itu dapat dibiayai oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

### **d. Ekspor**

Nilai ekspor pada tahun 2016 sebesar US\$33.316.185,53 dan pada tahun 2017 sebesar US\$39.316.185,53 dan tahun 2018 (s.d Novermber 2018) menurun menjadi US\$38.361.310,18 tahun 2019 ditargetkan sebesar US\$43.500.000,00. Untuk mencapai target

ekspor di tahun 2019, diperlukan kerja keras pelaku perdagangan dengan peningkatan kualitas produk, meningkatkan aksesibilitas perizinan usaha dan kualitas promosi produk. Nilai Komoditi ekspor tertinggi pada komoditi tekstil dan produk tekstil, dengan asumsi kondisi perekonomian Indonesia membaik.

Perkembangan indikator makro ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.8**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018
<b>A</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>			
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	5,50
<b>B</b>	<b>Inflasi</b>	%	4,2	2,79
<b>C</b>	<b>Investasi</b>			
1	Nilai Investasi PMDN	Rp.	3.783.600.387,524	5.584.259.954.480,86
2	Nilai Investasi PMA	US\$	262.662.078,00	193.830.919,16
3	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	167.257	161.307
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,78	5.76

Sumber: BPS 2018, BAPPEDA Sleman 2019, DPMPT 2019, Dinas Tenaga Kerja 2019

### **BAB III**

## **ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

### **1.1 Tema Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2020**

Tema pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah **“Memantapkan potensi ekonomi lokal daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya”**. Tema pembangunan tersebut terdapat keselarasan dengan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dan RKPD DIY Tahun 2020 yang terlihat dari kata kunci utama tema yaitu:

1. Memantapkan potensi lokal, didukung dengan upaya:
  - a. Mempertahankan daya saing ekonomi lokal unggulan
  - b. Peningkatan infrastruktur
  - c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
2. Menuju kemandirian, didukung dengan upaya
  - a. Peningkatan daya saing daerah
  - b. Peningkatan kualitas SDM
3. Menuju kesejahteraan, didukung dengan upaya
  - a. Peningkatan kualitas kesehatan
  - b. Peningkatan kualitas pendidikan
  - c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
  - d. Penurunan ketimpangan sosial ekonomi
4. Masyarakat Sleman yang berbudaya, didukung dengan upaya:
  - a. Peningkatan kenyamanan dan ketertiban umum
  - b. Peningkatan tata kelola pemerintahan
  - c. Penguatan penegakan hukum
  - d. Peningkatan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal dan kesetaraan gender

## **1.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2020**

Sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut diatas, ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan Kabupaten Sleman Tahun 2020 meliputi :

1. Tata kelola pemerintahan;
2. Budaya;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;
5. Penanggulangan kemiskinan;
6. Pengembangan potensi lokal;
7. Infrastruktur;
8. Lingkungan Hidup;

Dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan tahun 2020 tersebut maka asumsi kondisi Kabupaten Sleman yang dijadikan asumsi dalam RAPBD Kabupaten Sleman tahun 2020 adalah:

### **1. Inflasi**

Proyeksi inflasi Nasional sebesar  $3,5\% \pm 1\%$ , dengan nilai tukar rupiah Rp12.800-Rp13.800 per US\$ serta suku bunga SPB 3 bulan antara 4,0%-6,0%. Proyeksi inflasi hanya dapat terealisasi jika otoritas fiskal dan moneter dapat berkoordinasi secara intensif sehingga kebijakan yang dilahirkan dari pemerintah maupun Bank Indonesia dapat bersinergi. Inflasi dari sisi komponen harga yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak harus mendapat perhatian serius agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Nilai tukar harus dijaga dari dampak risiko pengetatan likuiditas global sehingga nilai tukar tidak terjun bebas seperti sekarang ini dan harus dijaga pada batas psikologis masyarakat yaitu di bawah Rp13.000. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan juga perlu terus dikawal dari ekspek risiko rencana kenaikan suku bunga The Fed.

Inflasi di Kabupaten Sleman tahun 2018 sebesar 2.79%. Laju inflasi tersebut sangat tergantung pada sisi komponen harga yang diatur

pemerintah dan komponen harga bergejolak harus mendapat perhatian serius agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Keterlibatan langsung pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sangat diperlukan guna menjaga stabilitas harga.

## 2. Pertumbuhan ekonomi

Dalam penyusunan RAPBN Perubahan 2018 di depan DPR, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi direvisi sebesar sebesar 5,0%-6,1%, pertumbuhan tersebut masih di bawah target RPJMN di 2018 yakni sebesar 6,0%-6,6%. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada batas bawah 5,0% mungkin saja dapat terealisasi.

Hal itu dapat terwujud jika pemerintah dapat menjaga laju konsumsi rumah tangga dan mendorong investasi serta meningkatkan kinerja ekspor komoditas strategis bernilai tambah tinggi sambil menahan laju impor barang konsumsi yang kurang produktif mendorong perekonomian. Pemerintah harus dapat memanfaatkan bonus demografi dan tumbuhnya kelas menengah serta komitmen investasi baik dalam maupun luar negeri.

Kegiatan perekonomian Kabupaten Sleman pada tahun 2018 diharapkan pertumbuhan dari masing-masing sektor dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap PDRB. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 diperkirakan sebesar 5,48%.

## 3. Jumlah pengangguran terbuka

Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2018 sebesar 5,76% lebih kecil dari tahun 2017 sebesar 5,78%, diharapkan jumlah pengangguran terbuka tahun 2019 lebih kecil dari tahun 2018 ditargetkan menurun menjadi 5.60%.

## 4. Jumlah penduduk miskin

Diharapkan jumlah KK miskin menurun pada tahun 2018. Target RPJMD tahun 2016-2021, jumlah KK miskin berkurang 0,68% setiap tahun. Jumlah KK miskin pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 9,48% sedangkan jumlah penduduk miskin ditargetkan sebesar 6,87% .



## 5. Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana alam

Kejadian luar biasa dan bencana alam merupakan kejadian yang tidak kita inginkan bersama, namun berdasarkan pengalaman sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman mempunyai potensi wilayah endemi demam berdarah dan mempunyai potensi bencana alam yang disebabkan oleh aktifnya gunung merapi, bencana angin puting beliung dan gempa, serta serangan hama pada wilayah pertanian diasumsikan masih dengan intensitas yang sama dengan tahun 2018. Pelaksanaan APBD 2019 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta antisipasi terhadap kejadian luar biasa dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Pada tahun 2020, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, 4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dari APBN, dan 5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Keistimewaan dan BOSNAS. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2020, adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan

daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.

c. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada:

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 15,37% dari tahun 2019 dengan kenaikan terbesar dari komponen pendapatan asli daerah;
- 3) Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU disamakan dengan pendapatan murni 2019 dan DAK dihitung berdasarkan realita serapan tahun anggaran 2019;
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku;
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
- 3) Pendayagunaan asset daerah;
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan

Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;

- 5) Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

Pendapatan daerah pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp3.113.553.988.857,55 meningkat sebesar Rp350.130.717.657,93 dari pendapatan APBD tahun 2019 sebesar Rp2.763.423.271.199,62 dengan perincian sebagai berikut:

- 1). Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp42.808.512.981,93 dari Rp900.278.920.723,56 menjadi Rp943.087.433.705,49 terdiri dari:
  - a) Pajak Daerah meningkat sebesar Rp41.600.000.000,00 dari Rp599.500.000.000,00 menjadi Rp641.100.000.000,00.
  - b) Retribusi Daerah meningkat sebesar Rp1.247.144.200,00 dari Rp45.064.753.650,00 menjadi Rp46.311.897.850,00.
  - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp12.008.556.121,93 dari Rp36.656.761.755,10 menjadi sebesar Rp48.665.317.877,03.
  - d) Lain-lain pendapatan asli daerah turun sebesar Rp12.047.187.340,00 dari Rp219.057.405.318,46 menjadi sebesar Rp207.010.217.978,46.
- 2). Dana Perimbangan meningkat sebesar Rp24.891.442.550,00 dari Rp1.387.029.665.450,00 menjadi Rp1.411.921.108.000,00 terdiri dari :
  - a) Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak berkurang sebesar Rp652.459.000,00 dari Rp.50.666.612.000,00 menjadi Rp50.014.153.000,00.
  - b) Dana Alokasi Umum tetap sebesar Rp1.026.081.409.000,00.
  - c) Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar Rp25.543.901.550,00 dari Rp310.281.644.450,00 menjadi Rp335.825.546.000,00.

- 3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar Rp282.430.762.126,00 dari Rp476.114.685.026,06 menjadi Rp758.545.447.152,06 terdiri dari :
- a) Pendapatan Hibah turun sebesar Rp72.665.000.000,00 dari Rp79.319.102.299,00 menjadi Rp6.654.102.299,00.
  - b) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya meningkat Rp1.490.622.126 dari Rp223.594.065.727,06 menjadi Rp225.084.687.853,06.
  - c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tetap sebesar Rp170.882.517.000,00.
  - d) Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya meningkat sebesar Rp353.605.140.000,00 dari Rp2.319.000.000,00 menjadi Rp355.924.140.000,00.

## **2. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi

tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp3.252.812.387.168,70 meningkat sebesar Rp156.382.549.570,93 dibanding rencana perubahan belanja tahun 2019 sebesar Rp3.096.429.837.597,77. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp1.507.776.413.853,70 dan belanja langsung sebesar Rp1.745.035.973.315,00 sehingga pada Tahun Anggaran 2020 defisit anggaran sebesar Rp139.258.398.311,15 dari pendapatan. Anggaran belanja tidak langsung tersebut dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, THR dan gaji ketiga belas serta belanja tak terduga. Anggaran belanja langsung dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan fungsi dan urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan.

#### **a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, THR, dan gaji ketigabelas dan belanja tak terduga.

##### **1). Belanja Pegawai**

- Penganggaran belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perencanaan belanja pegawai memperhitungkan accres gaji 1% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, THR, gaji ketigabelas dan penambahan jumlah pegawai.

- Pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- Belanja pegawai mengalami penurunan sebesar Rp25.633.769.612,30 menjadi Rp1.050.497.566.823,70 dari rencana perubahan anggaran belanja tahun 2019 Rp1.076.131.336.436,00 yang digunakan untuk gaji pegawai termasuk bupati, wakil bupati, anggota DPRD, insentif, dan TPP.

2). Bunga

Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Belanja bunga mengalami penurunan sebesar Rp1.730.125.302,00 dari Rp1.870.801.224,00 menjadi Rp140.675.922,00.

3). Hibah

Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/ atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

Belanja hibah mengalami kenaikan sebesar Rp36.705.356.083,00 dari Rp68.505.900.000,00 menjadi Rp105.211.256.083,00.

Peningkatan belanja hibah tersebut diantaranya hibah kepada KPU, Bawaslu, Polres, dan KODIM dalam rangka keperluan Pilkada tahun 2020.

4). Bantuan Sosial

Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.

Bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp2.955.900.000,00 dari Rp29.386.900.000,00 menjadi Rp26.431.000.000,00.

- 5). Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Belanja Bagi Hasil turun sebesar Rp.4.586.430.239,00 dari Rp72.303.199.664,00 menjadi sebesar Rp67.716.769.425,00.

- 6). Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Desa

Bantuan Keuangan mengalami penurunan sebesar Rp16.973.895.554,00 dari sebesar Rp271.253.041.154,00 menjadi sebesar Rp254.279.145.600,00

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa.

Bantuan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa penerima bantuan keuangan, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa.

- 7). Belanja tidak terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial).

Belanja tidak terduga pada tahun 2020 direncanakan menurun sebesar Rp3.552.106.920,22 dari belanja awal Rp7.052.106.920,22 menjadi sebesar Rp3.500.000.000,00.

Penurunan belanja tidak terduga dikarenakan untuk tambahan alokasi anggaran hibah dalam rangka Pilkada 2020.



**b. Kebijakan Belanja Langsung**

Kebijakan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium/upah kerja, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Anggaran Belanja Langsung untuk Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp1.745.035.973.315,00 meningkat sebesar Rp175.109.421.115,45 bila dibandingkan dengan anggaran perubahan tahun 2019 yaitu Rp1.569.926.552.199,55.

Defisit anggaran untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 sebesar Rp139.258.398.311,15.

**c.Kebijakan Prioritas dan Sasaran Pembangunan**

**Tabel 4.1**  
**PRIORITAS SASARAN, PROGRAM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020**

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
1	Tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Predikat LAKIP Kabupaten	Predikat	A (83,00)	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	25%
						Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A	99%
							Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	20 Jumlah SKPD

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%
						Program peningkatan administrasi pemerintahan	Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggara-raan pemerintahan diatas 70	16 Kecamatan
						Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90%
						Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100%
						Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	95%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"	90%
							Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	80%
						Program peningkatan budaya pemerintahan	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada OPD Pemerintah Kabupaten Sleman	50%
						Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase SKPD yang menerapkan tertib arsip dengan kategori baik.	79%
						Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS/ Bimtek/ Setifikasi JFA/IB/TB	100%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
			Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK	WTP	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar	100%
							Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah	100%
							Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
						Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah	86 desa

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	34	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target	5%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	81,8	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)	90%
							Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan. Pengelolaan. dan Penanganan Aduan	100%
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%
						Program Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data untuk perencanaan	75%
						Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang aktif	90%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase penanganan permasalahan di wilayah perbatasan	100%
						Program pengkajian dan penelitian bidang iptek	Persentase agenda riset daerah yang menjadi dokumen penelitian/ kajian	36%
						Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kearsipan	81.8%
						Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%
							Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	99.45%
							Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	96.02%
							Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	90.57%
						Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer	100%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
							Jumlah publikasi informasi melalui media online	375 Publikasi
							Jumlah lelang pengadaan barang jasa	250 Lelang
						Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Kondisi gedung pemerintahan baik	86.55%
						Program pengelolaan dan pengembangan persandian daerah	Persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya	90%
						Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	100%
						Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%
						Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%



NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	100%
						Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif	67,00%
						Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas anggota linmas	2540 orang
						Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah kelompok jaga warga	150 kelompok
						Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah modul layanan pemerintahan berbasis TIK	55 layanan
							Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK	60 layanan
							Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	42

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
							Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	100%
						Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Persentase pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi berita di media sebagai materi arah kebijakan daerah	80%
						Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo	70%
						Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer	100%
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi	93%
							Persentase pelayanan pensiun tepat waktu	93%
							Persentase pelayanan pensiun tepat waktu	92%
						Program Pendidikan Kedinasan	Persentase kepuasan pengguna alumni	72%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
							diklat	
						Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan	50%
						Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi Perda	3 Perda
						Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	
							Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Peraturan Daerah	80%
						Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum	Persentase penanganan hukum	100%
						Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	93%
						Program Penyelesaian Konflik konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi	100%
						Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bidang tanah desa yang didaftarkan di BPN	500 bidang
						Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN	500 bidang
		Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Jumlah lembaga tangguh bencana	Desa dan satuan pendidikan aman bencana	65 desa dan 72 satuan pendidikan aman bencana	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	12 dokumen
						Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik	75,00%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
							Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	10008 orang
						Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	95%
						Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase perbaikan rumah akibat bencana	70%
		Meningkatnya kerukunan masyarakat	Jumlah konflik SARA	Kasus	≤ 3	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase Penanganan Kejadian SARA	100%
						Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah rekomendasi kemitraan wawasan kebangsaan	4
						Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah kasus di masyarakat sebagai akibat dari penyakit masyarakat	
						Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades	79%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase ormas kepemudaan yang aktif	91%
2	Budaya	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	2,30%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase pemenuhan hak anak	85%
						Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase lembaga PUG aktif	100%
						Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah desa lokasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	34 Desa
						Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	100%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
		Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase Pelestarian warisan budaya	%	35,50%	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	66,00%
						Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	29,00%
						Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya	40.28%
						Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	2,50%
						Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi	2 event seni
						Program Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah taman budaya di Kabupaten	1 taman budaya
						Program Pelestarian dan Pengembangan peninggalan budaya	Persentase pelestarian dan pengembang-an	28.01%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
							peninggalan budaya	
						Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana	2 layanan
						Program Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	3 sumber sejarah
3	Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	78,32	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Melanjutkan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs	%	APK SD/MI $\geq$ 100%, APK SMP/MTs $\geq$ 100% APM SD/MI : $\leq$ 100% APM SMP/MTs : 85,95%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Melanjutkan	110,15%



NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
							Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah:	
							SD	91.79%
							SMP	94.21%
			Harapan lama sekolah	tahun	16,63			
			Rata-rata lama sekolah	tahun	10,8			
			Nilai rata rata	nilai		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	92,17%
			Ujian			Program pengembangan kreativitas siswa dan guru	Jumlah guru kreatif dan mengikuti lomba	158 Jumlah prestator
							Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akdemis dan non akademis tingkat Kabupaten	175 Jumlah prestasi
							Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akdemis dan non akademis tingkat Propinsi	26 Jumlah prestasi

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
							Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akdemis dan non akademis tingkat nasional	5 Jumlah prestasi
			SD/MI,		211,23	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS)	97.3%
							Persentase sekolah yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100,00%
			SMP/MTs		256,6	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal	Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman	78,00%
							Meningkatnya angka melek huruf di kabupaten sleman	99,55%
							Terbentuknya desa berkarakter	13 Desa

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program Pengembangan Budaya Baca	Persentase minat baca masyarakat	58.18%
						Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan desa dan masyarakat	20 Unit
						Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalahgunaan Napza	75%
							Jumlah satuan tugas (satgas) narkoba tingkat desa	64 Satuan Tugas
4	Kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	Tahun	74,8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan jenis obat menurut kelas terapi	95%
						Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	97.5%
							Menurunnya AKI	47.83 per 100.000 kelahiran hidup

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
							Menurunnya AKB	4.03 per 1000 kelahir-an hidup
							Persentase desa stop buang air besar sembarangan (BABS)	100%
							Persentase desa Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	80%
							Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	100%
							Persentase angka bebas jentik	≥95%
						Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan	79%
						Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase rumah tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	57.5%
						Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Status balita gizi buruk	0.45%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
							Cakupan balita pendek dan sangat pendek	11.2%
						Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap PHBS	60%
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Pengendalian penyakit menular	100%
						Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Desa yang sudah terbentuk Posbindo	86 Desa
							Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	96%
								3.7%
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kualitas pelayanan kesehatan baik (puskesmas)	100%
							Kualitas pelayanan kesehatan baik (RS Pemd)	100%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan sarana prasarana di rumah sakit	95%
						Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan Balita	< 1.6 per 1000 kelahiran hidup
						Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan masyarakat baik	
						Program perencanaan sosial budaya	Persentase kajian sosial budaya yang diimplementasikan	84%
						Program Keluarga Berencana	Angka prevalensi peserta KB aktif	76.6%
							Total Fertility Rate (TFR)	2 angka per 1.000 penduduk perempuan
						Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	86%
							Persentase KB pria	8.4%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase capaian KB mandiri	66.6%
						Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah kelompok PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang berkualitas pada PIK-R tingkatan tegar	143 Jumlah kelompok
						Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mendukung program KB	86 Kelompok
						Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu Padu)	83 Kelompok
						Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase prestasi olahraga pelajar	100%
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang layak	83%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS	Jumlah desa yang telah mendapat orientasi HIV AIDS	14 Desa
						Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase usia nikah bagi perempuan < 20 tahun	0.49%
5	Penanggulangan kemiskinan	Menurunnya kemiskinan	Persentase KK miskin	%	8,5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kelompok PMKS yang aktif	325 Kelompok
			Persentase penduduk miskin	%	6,36	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan penanganan orang terlantar dan anak jalanan	100%
						Program pembinaan anak terlantar	Cakupan penanganan anak terlantar	100%
						Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Cakupan penanganan penyandang cacat dan trauma	100%
						Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Cakupan pembinaan panti asuhan/panti jompo	100%



NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggula-ngan Kemiskinan (TPK) Desa	85%
						Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih	40%
						Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah terbentuk	43 Bumdes
						Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	65%
						Program pengembangan perumahan	Ketersediaan rumah layak huni	99%
						Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	presentase ormas pemuda yang aktif dibidang kewirausahaan	
							Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang mandiri	17%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Infrastruktur pedesaan dalam kondisi baik (air bersih)	65.62%
6	Pengembangan potensi lokal	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian	Lama tinggal wisatawan	Hari	Wisatawan Nusantara: 2,04 wisatawan Manca-negara: 2,01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Promosi Wisata	100%
			Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	8.200.000	Program Pengembangan Desa Wisata	Jumlah desa wisata kategori mandiri	11 desa wisata
						Program pengembangan destinasi pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata	3 buah
						Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kerjasama/kemitraan pariwisata	7 Buah
			Nilai ekspor	US\$	41.750.000	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor kumulatif	\$41.750.000
			Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	%	3,26	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan produksi komoditas pertanian	4,47%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	0.277%
						Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi ikan	9,00%
			Nilai Tukar Petani	Nilai	112,5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kenaikan kelas kelompok	48 Kelom- pok
						Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP GAP	15,00%
						Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Persentase peningkatan pengetahuan penyuluh dan petugas teknis	10,00%
						Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase penanganan kesehatan ternak	80%
						Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase peningkatan peternak yang menerapkan teknologi yang direkomendasi-kan	5%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi yang dirokemendasi-kan	6,59%
						Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Peningkatan jumlah ikan di perairan umum	2000 kg
						Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase peningkatan konsumsi ikan	1.1%
							Peningkatan produk perikanan yang bersertifikasi	5 Jumlah produk
						Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	100,00%
							Persentase cadangan pangan	100,00%
							Persentase Pola Pangan Harapan	89,00%
							Persentase ketersediaan informasi pasokan. harga dan akses pangan di daerah	90,00%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
							Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan	90,00%
							Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90,00%
							Persentase ketersediaan energi dan protein (energi)	140,00%
							Persentase ketersediaan energi dan protein (protein)	141,00%
							Peningkatan jumlah kelompok penangkar benih/bibit pertanian	2 Kelompok
						Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produk pertanian/ perkebunan yang bersertifikat	5 Jumlah produk
						Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan produk perternakan yang bersertifikat	3 Jumlah produk
			Persentase peningkatan nilai produksi industri	%	3,1	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah industri yang menerapkan standardisasi di tahun berkenaan	75 IKM

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra yang dikukuhkan	33 Sentra industri
						Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri yang menerapkan teknologi industri	55 IKM
						Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang meningkat kemampuannya dalam Pengelolaan Usaha	12,00%
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih	75,00%
						Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase konflik yang ditangani	100,00%
						Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan pencari kerja	57%
						Program Transmigrasi Regional	Persentase calon transmigran yang berangkat	60%
		Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	%	5,55	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan	44,00%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase investor sektor prioritas	87,50%
			Indeks Gini	Indeks	0,35 - 0,40	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi	7.500 milyar
						Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi yang terbentuk pertahun	10 Koperasi
						Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	93.5%
						Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan	27.893 Pelaku usaha perdagangan
						Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar	Persentase peningkatan pedagang pasar yang tertib	10,00%
						Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh	54%
							Jumlah temuan produk tidak layak dikonsumsi	202 produk

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang telah ditentukan	1529 Orang
						Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan aksesibilitas UMKM	45 UMKM
						Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	140 Wirausaha baru
7	Infrastruktur	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	Persentase prasarana dan sarana perekonomian yang berkualitas	%	79,07	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	Jumlah pasar dan obyek wisata dalam kondisi baik yang dimiliki kabupaten	28 Pasar dan obyek wisata
						Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Cakupan ketersediaan air untuk pertanian	79.6%



NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Embung dan sungai terkelola baik	84.65%
			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap didukung prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai.	%	82,50 dan 90	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jalan dan jembatan kab dalam kondisi baik dan sedang	
							Cakupan rehabilitas /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	40.1%
						Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Cakupan ketersediaan data base jalan dan jembatan	100%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Proporsi drainase dan gorong - gorong kabupaten dalam kondisi baik	64.55%
						Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Cakupan ketersediaan data base jalan dan jembatan	100%
						Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik	98,00%
						Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase peserta pembinaan	100%
						Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh	88.89%
						Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 dokumen
						Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase ketersediaan Prasarana dan fasilitas perhubungan	87,00%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase kondisi fasilitas LLAJ baik	83%
						Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	16,00%
						Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase ketersediaan perlengkapan keamanan lalu lintas	97%
						Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Umum (KBU) yang lolos uji	100%
						Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase ketersediaan prasarana, sarana dan kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan	70%
						Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana perhubungan	90%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
8	Lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKA= Indeks Kualitas Air	nilai	41,33	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	91.67%
							Jumlah dokumen KLHS tata ruang	0 dokumen
							Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	82%
			IKU= Indeks Kualitas Udara	nilai	72	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Layanan pengelolaan sampah Tipe A	17 Jumlah TPS
							Layanan pengelolaan sampah Tipe B	23 Jumlah TPS
							Layanan pengelolaan sampah Tipe C	355 Jumlah TPS
							Rasio layanan pengelolaan sampah	11.2 Rasio
							Sampah yang tertangani	53.05%

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
			IKLH= Indeks Kualitas Tutupan Lahan	nilai	32,29	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	79.3%
						Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kampung iklim	23 Kampung
							Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	16%
						Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (IPAL)	2.52%
							Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (SR)	33.1%
							Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat	21%
						Program penyediaan dan pengolahan air baku	Kondisi Prasarana penyediaan air baku baik	79.6%
						Program lingkungan sehat perumahan	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan jumlah sekolah berbudaya lingkungan	78 Sekolah
							Peningkatan jumlah pondok pesantren berbudaya lingkungan	30 Pondok pesantren
						Program pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah desa target pengawasan	50 desa
							Luasan alih fungsi lahan	< 100 ha
						Program pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	30%
						Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH yang dikelola	30.08%
							RTH yang dikelola (untuk kepentingan publik)	2 Unit

NO	PRIORITAS SLEMAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
						Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	66,42%
						Program perencanaan tata ruang	Jumlah desa target pengawasan	50 desa
							Luasan alih fungsi lahan	< 100 ha
						Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pertanahan	4 Jenis

### **3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada APBD 2020 adalah sebesar Rp189.710.029.311,15.

Adapun pengeluaran pembiayaan yang diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp50.451.631.000,00 yang dipergunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp46.575.000.000,00 dan pembayaran pokok hutang sebesar Rp3.876.631.000,00 atas pinjaman daerah yang dulu digunakan untuk pembangunan RSUD Sleman. Pembayaran pokok hutang pinjaman daerah tersebut sudah selesai pada tahun 2020.

Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada APBD 2020 sebesar



Rp139.258.398.311,15. Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

#### 4. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.

Tabel 4.2

##### RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

##### TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	PERUBAHAN APBD 2019	APBD 2020	MENINGKAT/(TURUN)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.763.423.271.199,62</b>	<b>3.113.553.988.857,55</b>	<b>350.130.717.657,93</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>900.278.920.723,56</b>	<b>943.087.433.705,49</b>	<b>42.808.512.981,93</b>
1.1.1	Pajak Daerah	599.500.000.000,00	641.100.000.000,00	41.600.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	45.064.753.650,00	46.311.897.850,00	1.247.144.200,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.656.761.755,10	48.665.317.877,03	12.008.556.121,93
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	219.057.405.318,46	207.010.217.978,46	(12.047.187.340,00)
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.387.029.665.450,00</b>	<b>1.411.921.108.000,00</b>	<b>24.891.442.550,00</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.666.612.000,00	50.014.153.000,00	(652.459.000,00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.026.081.409.000,00	1.026.081.409.000,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	310.281.644.450,00	335.825.546.000,00	25.543.901.550,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>476.114.685.026,06</b>	<b>758.545.447.152,06</b>	<b>282.430.762.126,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	79.319.102.299,00	6.654.102.299,00	(72.665.000.000,00)
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	223.594.065.727,06	225.084.687.853,06	1.490.622.126,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	170.882.517.000,00	170.882.517.000,00	0,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.319.000.000,00	355.924.140.000,00	353.605.140.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>2.763.423.271.199,62</b>	<b>3.113.553.988.857,55</b>	<b>350.130.717.657,93</b>
				-

NOMOR URUT	URAIAN	PERUBAHAN APBD 2019	APBD 2020	MENINGKAT/(TURUN)
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>3.096.429.837.597,77</b>	<b>3.252.812.387.168,70</b>	<b>156.382.549.570,93</b>
<b>2,1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.526.503.285.398,22</b>	<b>1.507.776.413.853,70</b>	<b>(18.726.871.544,52)</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.076.131.336.436,00	1.050.497.566.823,70	(25.633.769.612,30)
2.1.2	Belanja Bunga	1.870.801.224,00	140.675.922,00	(1.730.125.302,00)
2.1.4	Belanja Hibah	68.505.900.000,00	105.211.256.083,00	36.705.356.083,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.386.900.000,00	26.431.000.000,00	(2.955.900.000,00)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	72.303.199.664,00	67.716.769.425,00	(4.586.430.239,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	271.253.041.154,00	254.279.145.600,00	(16.973.895.554,00)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	7.052.106.920,22	3.500.000.000,00	(3.552.106.920,22)
<b>2,2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.569.926.552.199,55</b>	<b>1.745.035.973.315,00</b>	<b>175.109.421.115,45</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	222.116.867.755,76	219.679.696.541,00	(2.437.171.215)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	795.278.556.838,00	743.558.404.373,00	(51.720.152.465)
2.2.3	Belanja Modal	552.531.127.605,79	781.797.872.401,00	229.266.744.795
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>3.096.429.837.597,77</b>	<b>3.252.812.387.168,70</b>	<b>156.382.549.570,93</b>
	<b>Surplus /(Defisit)</b>	<b>(333.006.566.398,15)</b>	<b>(139.258.398.311,15)</b>	<b>193.748.168.087,00</b>
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>403.042.566.398,15</b>	<b>189.710.029.311,15</b>	<b>(213.332.537.087,00)</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	403.042.566.398,15	189.710.029.311,15	(213.332.537.087,00)
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>403.042.566.398,15</b>	<b>189.710.029.311,15</b>	<b>(213.332.537.087,00)</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	<b>70.036.000.000,00</b>	<b>50.451.631.000,00</b>	<b>(19.584.369.000,00)</b>
3.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	63.016.000.000,00	46.575.000.000,00	(16.441.000.000,00)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	7.020.000.000,00	3.876.631.000,00	(3.143.369.000,00)
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>70.036.000.000,00</b>	<b>50.451.631.000,00</b>	<b>(19.584.369.000,00)</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>333.006.566.398,15</b>	<b>139.258.398.311,15</b>	<b>(193.748.168.087,00)</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.